

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Sampah Sembarangan Oleh Masyarakat di Kota Tanjungpinang

Sofianto Sofianto

Program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji

Email: sopianto.fian003@gmail.com

Aditya Saputra

Program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji

Email: adityastra8@gmail.com

Mellyana Candra

Program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim

Raja Ali Haji

Email: Mellyana1001@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

Korespondensi Penulis: sopianto.fian003@gmail.com

Abstract. *In Tanjungpinang City, there are several piles of waste from household production located on the roadside. Not only waste from household production, but also waste that is left over from building materials. The accumulation of garbage on the roadside of Tanjungpinang City is increasingly unstoppable and new spots are always appearing wildly (Hanani, 2021). Therefore, this study aims to determine the role of the Tanjungpinang City Environment Agency in overcoming littering and its management. The method used to obtain data is the literature study method. The results showed that to deal with this waste problem, the Tanjungpinang City Government (Pemko) through the Environmental Agency distributed garbage cans and uniforms to the Waste Bank and Climate Village Programme (Proklam) from four sub-districts throughout Tanjungpinang City.*

Keywords: *Environmental Agency, Waste, Community of Tanjungpinang City*

Abstrak. Di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa titik tumpukan sampah dari produksi rumah tangga yang terdapat di pinggir jalan. Bukan hanya sampah dari produksi rumah tangga saja, tetapi juga sampah yang merupakan sisa dari material bangunan. Penumpukan sampah di pinggir jalan Kota Tanjungpinang semakin tidak bisa dibendung dan selalu saja muncul titik baru secara liar (Hanani, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaannya. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode studi literatur atau studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menangani masalah sampah ini, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup membagikan tong sampah dan baju seragam kepada Bank Sampah dan Program Kampung Iklim (Proklam) dari empat kecamatan se-kota Tanjungpinang.

Kata kunci: *Dinas Lingkungan Hidup, Sampah, Masyarakat Kota Tanjungpinang*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Masalah sampah telah menjadi ancaman, jika masyarakat membuang sampah pada tempat yang tepat, seperti tempat pembuangan sampah, setidaknya sampah dapat dikurangi. Namun kenyataannya, cenderung membuang sampah sembarangan. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya masalah membuang sampah sembarangan, serta kurangnya dukungan dari pihak yang berwenang dalam pengelolaan sampah. Menurut Saifuddin (2018) Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir setiap negara di dunia. Sampah selalu menjadi masalah tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Rata-rata kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah setiap harinya. Meski di sekitar kita terdapat tempat sampah, kita sering kali membuang sampah sembarangan. Sampah di pinggir jalan lebih banyak dibandingkan di tempat sampah. Wajar jika membuang sampah sembarangan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat peluang yang terbuka bagi provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana kebijakan sehingga dapat meningkatkan potensi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota menyatakan bahwa “hubungan antara urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib dan pilihan, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria urusan akuntabilitas dan efisiensi dengan tetap memperhatikan keselarasan. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak mengatur sendiri urusannya di luar urusan pemerintah pusat, termasuk permasalahan lingkungan hidup pada bidang yang merupakan permasalahan wajib pelayanan non-dasar. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah daerah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan di lingkungan atau sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari. Permasalahan ini sangat penting dan perlu menarik perhatian pemerintah daerah yang harus diselesaikan oleh karena permasalahan sampah cukup serius (Sangkala,2023).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini sedang dibahas kembali didedikasikan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Undang-undang ini diatur tentang: penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sebagai sumber pencemaran lingkungan, sudah seharusnya sampah dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, menjadi sumber penyakit, mengganggu dan juga merugikan masyarakat di sekitar, serta menyebabkan bencana alam seperti banjir (Hanani,2021).

Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyak nya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Di Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa titik tumpukan sampah dari produksi rumah tangga yang terdapat di pinggiran jalan. Bukan hanya sampah dari produksi rumah tangga saja, tetapi juga sampah yang merupakan sisa dari material bangunan. Hal ini tidak terjadi di salah satu titik saja. Penumpukan sampah di pinggir jalan Kota Tanjungpinang semakin tidak bisa dibendung dan selalu saja muncul titik baru secara liar (Hanani, 2021).

Pengelolaan sampah ini perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari akar hingga ujung, karena sampah sudah menjadi masalah yang serius bagi lingkungan masyarakat. Pengelola sampah hendaknya dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, bermanfaat dan ramah lingkungan. Namun sampah juga mempunyai dampak positif dan negatif. Sampah dapat memberikan dampak positif apabila

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Namun sampah akan berdampak buruk bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan akan berdampak ke masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup di suatu daerah, termasuk dalam pengelolaan sampah. Peran DLH dalam pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Membuat perencanaan dan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan Mengatur dan mengawasi pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah tangga dan tempat-tempat umum Membangun dan mengoperasikan tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai dengan standar lingkungan Mendorong pengurangan, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi bahan yang berguna Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar Dalam konteks kota Tanjung Pinang, DLH memiliki peran penting dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. DLH Tanjung Pinang telah melakukan beberapa kegiatan dalam pengelolaan sampah, seperti pengumpulan dan pengangkutan sampah, pembangunan TPA, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Tanjung Pinang, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi masalah pembuangan sampah sembarangan dan Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengelola sampah?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaannya. Dengan mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam mengatasi masalah pembuangan sampah sembarangan di Kota Tanjungpinang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Dari penelitian Hasibuan (2021) yang berjudul “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”. Dari hasil penelitian ini, didapatkan peran jasa lingkungan dalam pengurangan sampah adalah dengan merumuskan program dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya sampah. Peran dinas lingkungan dalam pemanfaatan sampah dengan membentuk bank sampah, kelompok peduli sampah dan amenitas. Kemudian terdapat hambatan jasa lingkungan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas persampahan, jumlah armada pengangkut sampah yang belum maksimal, teknik pengumpulan sampah yang kurang cepat dan belum adanya regulasi tentang pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dan untuk mengetahui hambatan dinas lingkungan hidup di kecamatan Rambah.

Sedangkan penelitian Suryo (2021) yang berjudul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan kota Pekanbaru” (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir). Dari hasil penelitian ini, hasil penelitian diketahui perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal hal ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir. Bukan hanya itu, belum ada prosedur pengelolaan sampah yang buat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Pada penelitian Syahril (2023) yang berjudul “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Jambi”. Dari hasil penelitian ini bahwa Dinas Lngkungan Hidup sudah benar melakukan dengan berupaya meminimalisir pembuangan sampah di pinggir Sungai. Namun, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat maka masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di Sungai. Dan dampak dari pembuangan sampah disungai itu menyebabkan kurangnya mutu air Sungai untuk masyarakat disekitarnya. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Lingkungan Hidup

dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. Juga untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah untuk menunjang pembangunan lingkungan perkotaan. Dan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Jambi terhadap pengelolaan sampah dalam menunjang pembangunan lingkungan perkotaan.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2022) yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai relatif kecil. Dari dua indikator yang mengungkap peran departemen tersebut, terdapat faktor pendukung. Artinya, kebijakan ditetapkan dalam bentuk aturan yang ditandai dengan adanya rencana kerja, visi dan misi yang jelas, SOP, dan struktur organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat, dan untuk mengetahui hambatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau.

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Arif & Naziyah (2023) yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker (Studi Kasus Di Kecamatan Mulyorejo)”. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021, namun belum maksimal. Sebab, masih terdapat beberapa kerentanan pada peran penyedia sarana dan prasarana terkait keterbatasan penyediaan fasilitas pengolahan limbah masker. Selain itu, pelaksanaan imbauan dinilai kurang intensif perannya dalam penguatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran negara dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta memberikan nasihat dan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah masker di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah metode studi literatur atau studi Pustaka. Studi literatur atau studi pustaka adalah salah satu metode penelitian yang paling mudah dan sering digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan, kajian pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan dengan cara mencari dan

membaca berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ini merupakan dinas yang terletak di Jalan Daeng Marewa, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Ruang lingkup dari Dinas ini yaitu kegiatan meliputi pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Untuk menangani masalah sampah ini, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup membagikan tong sampah dan baju seragam kepada Bank Sampah dan Program Kampung Iklim (Proklim) dari empat kecamatan se-kota Tanjungpinang. Dan empat kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tanjungpinang Timur kepada 21 Bank sampah berjumlah 105 orang dan 14 proklim berjumlah 248 orang.
- Kecamatan Bukit Bestari kepada 22 Bank sampah yang berjumlah 110 orang dan 7 proklim sebanyak 148 orang.
- Kecamatan Tanjungpinang Kota kepada 5 Bank sampah berjumlah 25 orang dan 11 proklim berjumlah 216 orang.
- Kecamatan Tanjungpinang Barat kepada 4 Bank sampah berjumlah 20 orang dan 8 proklim berjumlah 141 orang.

Terdapat dua faktor yang harus diperhatikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam menjamin keberhasilan mengatasi permasalahan pembuangan sampah sembarangan, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat:

Faktor Pendukung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki beberapa faktor pendukung dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah, seperti koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan non-daerah, serta pengembangan infrastruktur pemborongan sampah. Namun, ada juga beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, seperti kurangnya fokus pada pengurangan sampah dan kekurangan sumber daya pendukung. Dalam kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki beberapa faktor pendukung yang menjadikan dorongan terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk peraturan daerah, yang secara konsisten ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam rangka melestarikan lingkungan hidup setempat dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Contoh kebijakan dan peraturan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Jasa lingkungan ditata ulang. Menata kembali organisasi jasa lingkungan sehingga setiap organisasi dapat menjalankan misi dan fungsi pokoknya.
3. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Direktur Korporasi/Kegiatan dan Komunitas Lingkungan Hidup. Pembentukan lembaga swadaya masyarakat untuk menanggapi saran dan kritik masyarakat.
4. Penggunaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bersumber dari APBD.
5. Pemanfaatan anggaran dilakukan untuk memanfaatkan anggaran yang disediakan APBD agar anggaran tersebut tepat sasaran.
6. Terdapat program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat terus berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kearifan budaya lokal masyarakat yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Kebudayaan lokal biasanya didukung oleh adat istiadat setempat dengan norma-norma yang sesuai dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan pencapaian pada program pada tahun 2022 dalam menjalankan rencana kegiatannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang masih mendapatkan beberapa hambatan yang meliputi:

1. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah; masyarakat biasanya mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurang memilah sampah antara sampah organik anorganik.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, seperti keterlambatan dalam penyalinan sampah dan kurangnya jumlah armada pengangkut sampah.
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya masalah membuang sampah sembarangan.
4. Kurangnya dukungan dari pihak yang berwenang dalam pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanjungpinang juga membuat beberapa program untuk pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. Kegiatan Gerakan Tanjungpinang peduli sampah
3. Kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan limbah rumah tangga
4. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman ramah lingkungan
5. Kegiatan Pembinaan sosialisasi bank sampah se Kota Tanjungpinang
6. Kegiatan Pembinaan komunitas peduli sampah dan lingkungan
7. Kegiatan lomba produk kreatif 3R
8. Kegiatan Inventarisasi konservasi keanekaragaman hayati
9. Kegiatan inventarisasi konservasi lingkungan (tanah, air, udara) dan kawasan konservasi.

Dengan adanya program tersebut, itu menunjukkan komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh. Langkah-langkah seperti pemilahan sampah di sumber, penggunaan teknologi canggih dan partisipasi masyarakat aktif merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran dalam memilah sampah dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah sangat penting. Melalui sosialisasi edukasi yang efektif, Dinas Lingkungan Hidup mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Permasalahan sampah Kota Tanjungpinang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proses pemilahan sampah basah dan sampah kering, meskipun ada sebagian masyarakat yang memisahkan sampah basah dan sampah kering pada saat pengangkutan. Sampah dipisahkan oleh petugas kebersihan. Namun karena kurangnya fasilitas pengolahan sampah organik dan anorganik serta sampah kegiatan pasar yang menumpuk setelah diangkut ke TPA, diangkut bersama oleh pihak berwenang dan sampah tersebut kembali menumpuk. Juga terdapat sampah yang berasal dari laut yang berasal dari tempat lain. Seluruh sampah yang dihasilkan dibuang ke TPA, namun karena keterbatasan wilayah operasional, kapasitas TPA untuk menampung sampah tersebut hampir penuh. dan tidak bisa menampung lagi. Menurut Tara (2023) Meningkatnya timbunan sampah dari hari ke hari dan pembuangan sampah yang sembarangan serta tidak tepat, juga pengelolaan sampah yang tidak tepat merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang tidak akan pernah terselesaikan di suatu daerah akibat sampah tersebut akan menjadi masalah apabila tidak diatasi dengan baik. lanjut .Permasalahan sampah ini akan memberikan dampak yang serius bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang telah berperan dalam mengatasi masalah pembuangan sampah sembarangan dan pengelolaannya. Peran tersebut meliputi: Pembagian tong sampah dan baju seragam kepada Bank Sampah dan Program Kampung Iklim (Proklim). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan cara memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Pembuatan program pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, yaitu: Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diberikan beberapa saran, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Satpol PP. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media massa, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan memanfaatkan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Skripsi

- Arif, L, Naziyah A. F. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker.
- Hasibun F. M. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Hasan E, Kausar M. (2021). Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (Ott) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota (Dlhk3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan Di Kota Banda Aceh.
- Junriana, Dkk. (2023). Fungsi Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Dalam Pengawasan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang
- Masnun, Dkk. (2017) Implementasi Pasal 29 Ayat (1) Huruf E UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terkait Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membuang sampah.
- Sangkala Rif'at S. M. (2023). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- Sakti Hari Nahara. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.
- Syahril Sutan. M. (2023). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi.
- Suryo Tri Saebu. (2021). Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- Saifuddin Ahmad (2018). Dampak Buang Sampah Sembarangan Cemari Lingkungan.
- Tara Karlina Tika. (2023). Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang (uu) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang (uu) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan pemerintah (pp) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kota Tanjungpinang: Serahkan Bantuan Kepada Bank Sampah Dan Proklam, Rahma: Bentuk Apresiasi Dari Pemerintah.